

Pengelolaan Obligasi Daerah

Oleh: DR. Adler Haymans Manurung, M.Com., ME

Pendahuluan

Pemerintah regional atau daerah yang dapat dikelompokkan dari menjadi dua kelompok besar yaitu Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Pemerintah tersebut membelanjai kebutuhan daerahnya melalui pendapatan daerah yang setiap tahun dibuat dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) disahkan oleh DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah) yang bersangkutan. Pendapatan daerah diperoleh melalui redistribusi, DAU (dana alokasi umum) dari pusat dana bagi hasil dan sebagainya. Seringkali daerah kurang cukup pendapatannya untuk membiayai proyek yang sedang dikerjakan sehingga mempunyai kesulitan dalam penyelesaian bahkan menunggu dana dari pusat maupun untuk berikutnya.

Sejak berlakunya Undang-undang Otonomi daerah yang dituangkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka penataan pemerintahan dan keuangan daerah semakin mempunyai peranan. Kesulitan yang dihadapi akan terpecahkan dengan keluarnya Undang-undang ini. Kemudian, kekurangan dana dalam APBD dapat dilakukan melalui pinjaman atau obligasi daerah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah. Dalam PP ini disebutkan daerah melakukan pinjaman atau menerbitkan Obligasi daerah yang bersangkutan.

Tetapi, hanya pinjaman daerah yang akan dapat dikerjakan karena penerbitan obligasi belum secara jelas diuraikan dalam PP ini. Selanjutnya, karena penerbitan obligasi merupakan wewenang Menteri Keuangan maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah. Peraturan ini secara jelas menguraikan cara menerbitkan obligasi daerah dan diharapkan dapat membantu daerah untuk mendapatkan dana.

Selanjutnya, Pemerintah daerah harus memikirkan bagaimana mengelola obligasi daerah tersebut agar obligasi daerah yang diterbitkan diminati investor. Walaupun sebenarnya, Peraturan Menkeu tersebut menguraikan didirikannya Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti dan mempersiapkan serta penerbitan sampai jatuh tempo obligasi daerah tersebut. Penerbitan obligasi yang waktunya sesuai dengan dana yang dimiliki investor merupakan faktor penting untuk membuat obligasi daerah dapat laku dijual di pasar primer. Pemberian informasi juga sangat penting agar transaksi obligasi di pasar sekunder menjadi sangat likuid.

Investor yang melakukan investasi terhadap obligasi daerah juga memerlukan pengetahuan yang mendalam mengelola obligasi ini. Pengetahuan khusus diperlukan untuk mengelola obligasi ini karena mempunyai ciri tersendiri dan umumnya memberikan yield sedikit diatas yield obligasi Pemerintah Pusat yang saat ini banyak beredar di pasar.

Bagaimana pengelolaan portofolio obligasi baik dari segi pemerintah daerah sebagai penerbit dan investor sebagai pemilik merupakan pembahasan paper ini. Paper ini dibagi dalam lima bagian. Bagian berikutnya membahas konsep dan definisi obligasi daerah dimana didalamnya diuraikan obligasi yang sesuai diterbitkan pemerintah daerah. Bagian Ketiga membahas mengenai investor obligasi daerah dan mungkin obligasi

daerah ini akan diserap pasar dikemudian hari. Bagian keempat menjelaskan pengelolaan obligasi daerah baik dari pemerintah daerah dan investor. Akhirnya, tulisan akan memberikan kesimpulan ringkas.

Obligasi Daerah

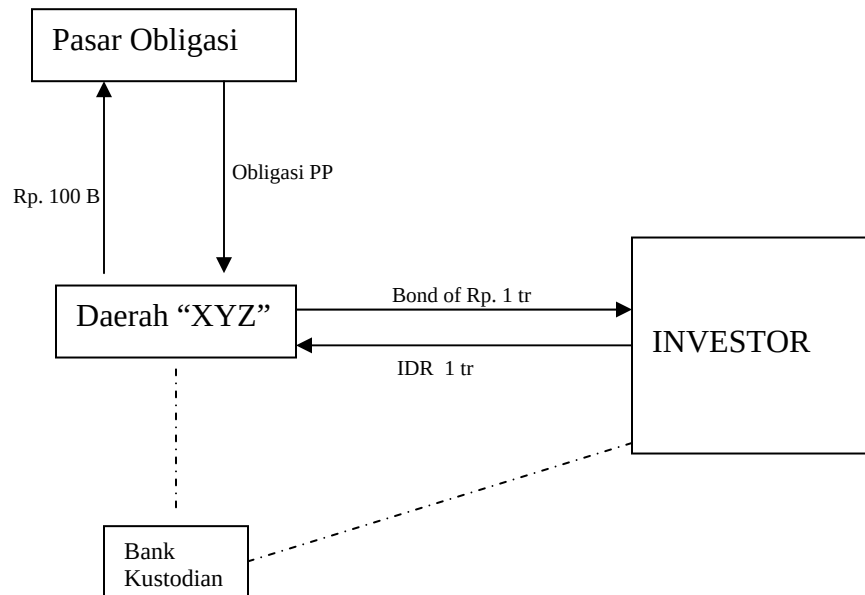
Obligasi daerah adalah surat hutang yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mendapatkan dana dalam rangka membiayai daerah yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2005 tentang Pinjaman daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.07/2006 menyatakan Obligasi adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Obligasi daerah yang dikenal dengan Municipal Bond sudah sangat terkenal di Amerika Serikat bahkan investor banyak melakukan investasi pada obligasi ini baik dana pension, asuransi, manajer investasi maupun perusahaan swasta serta pemerintah daerah lain yang kelebihan dana. Obligasi daerah sudah bisa diterbitkan daerah dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah. Peraturan ini memberikan peluang dan juga kehati-hatian bagi daerah untuk menerbitkan obligasi daerah.

Obligasi negara yang diterbitkan Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan mempunyai jangka waktu dari 3 tahun sampai dengan 30 tahun. Obligasi daerah ini akan mempunyai umur sangat bervariasi tergantung dari perencanaan keuangan daerah tersebut. Persoalan utama yang muncul adalah Kepala Daerahnya sudah tidak memerintah lagi tetapi obligasinya belum jatuh tempo, sehingga kepastian pembayaran obligasi tersebut belum bisa dikatakan dibayar. Sebaiknya, Pemerintah membuat peraturan lagi yang terikat kepada semua Kepala Daerah yang menjabat turut bertanggungjawab atas seluruh pinjaman tersebut.

Alternatif lain yang bisa dilakukan yaitu membuat periode obligasi daerah tidak melebihi 4 tahun. Obligasi harus sudah terbayar sebelum Kepala Daerah tidak memimpin kembali. Dalam kasus ini, perencanaan keuangan daerah harus lebih jelas dan teliti sehingga pemberdayaan pihak yang terkait seperti Kantor Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat mutlak dilaksanakan. SKPD harus mempunyai kualifikasi yang memadai dengan cara mengikuti pelatihan dan pendidikan yang sesuai serta bersertifikasi.

Alternatif lain yang bisa dilakukan yaitu dengan cara membuat struktur obligasi yang mana obligasi tersebut mempunyai jaminan akan terbayar melalui struktur produk yang dilakukan. Struktur produk yang dilakukan sebagai berikut: Obligasi daerah diterbitkan Rp. 1 triliun dengan periode 30 tahun, kemudian dananya sebesar Rp. 100 milyar dibelikan obligasi Pemerintah Pusat dengan kupon 8% selama periode 30 tahun. Nilai hasil obligasi Pemerintah Pusat tersebut akan bernilai Rp. 1 triliun setelah 30 tahun, artinya pokok obligasi daerah akan terbayar, tetapi daerah hanya memikirkan pembayaran kuponnya. Pembayaran kupon dapat dilakukan melalui proyek dari Rp. 900 milyar atas kelebihan penerbitan obligasi daerah tersebut. Kasus ini akan menyelesaikan persoalan permintaan jaminan Pemerintah atas obligasi daerah tersebut. Karena obligasi Pemerintah Pusat sudah menjamin terbayarnya obligasi daerah tersebut.

Bagan 1: Penerbitan Obligasi Daerah dengan Struktur Penjaminan



Menurut Fabozzi (2004) bahwa obligasi dapat dikelompokkan menurut penerbit dan kupon obligasi. Obligasi daerah merupakan obligasi berdasarkan penerbitnya. Obligasi dikelompokkan berdasarkan kuponnya yaitu obligasi berkupon nol (Zero Coupon bond); obligasi berkupon tetap dan obligasi berkupon mengambang serta obligasi pendapatan. Obligasi berkupon nol adalah obligasi yang tidak mempunyai kupon selama periode obligasi. Investor membeli obligasinya pada harga diskon dan pada jatuh tempo mendapatkan nilai jatuh tempo yang tertera pada obligasi tersebut. Sebenarnya, obligasi ini membayar kupon di awal pembelian obligasi. Harga obligasi ini akan mengalami kenaikan secara garis lurus dari mulai dibeli investor sampai jatuh tempo dengan catatan tidak melakukan perdagangan atas obligasi ini. Bila terjadi tingkat bunga naik atau turun maka obligasi ini mempunyai harga jauh lebih rendah dari harga yang dihitung secara amortisasi garis lurus. Obligasi berkupon tetap adalah obligasi yang mempunyai kupon tetap selama periode obligasi tersebut. Bila pada saat diterbitkan besarnya kupon 10 persen maka obligasi tersebut akan membayar kupon tetap 10 persen selama periode obligasi. Bila terjadi tingkat bunga pasar naik maka harga obligasi ini yang mengalami penurunan dan sebaliknya harga obligasi mengalami kenaikan bila tingkat bunga pasar mengalami kenaikan. Obligasi berkupon mengambang adalah obligasi yang tingkat kupon tidak tetap selama periode obligasi. Biasanya obligasi ini mengacu kepada sebuah tingkat bunga dengan tambahan premium, misalkan tingkat bunga SBI + 200 bps (basis poin = 2%). Bahkan Australia menerbitkan obligasi yang dikaitkan dengan inflasi dengan tambahan premium beberapa ratus basis poin. Tingkat bunga kupon ditentukan sekali enam bulan dimana penentuan paling cepat satu minggu sebelum tingkat bunga kupon tersebut diberlakukan. Obligasi pendapatan adalah obligasi yang kuponnya didasarkan kepada pendapatan penerbit obligasi. Obligasi ini sudah ada di Indonesia diterbitkan PT Citra Marga NP. Obligasi sangat cocok untuk obligasi yang mempunyai

pendapatan dapat dihitung secara jelas dan pasti misalkan jalan tol, perusahaan air minum dan listrik dan sebagainya.

Berdasarkan uraian jenis obligasi tersebut, maka obligasi yang sangat sesuai dengan daerah yaitu obligasi berkupon nol dan obligasi pendapatan. Obligasi berkupon nol sangat tepat diterbitkan oleh daerah karena daerah tidak perlu memikirkan pembayaran bunga setiap periode yang dijanjikan seperti obligasi umumnya. Pemerintah daerah hanya memikirkan nilai jatuh tempo pada saat jatuh tempo. Artinya, dalam perencanaan keuangan daerah tersebut sudah dibuat besaran pembayaran yang akan dilakukan setiap tahun. Penerbitan obligasi daerah membuat Kepala daerah yang bersangkutan harus memahami keuangan daerah dan tidak membuat persoalan kepada pegawai yang membantu untuk mengaturnya. Obligasi ini membuat daerah harus tertib dalam keuangan dalam jangka panjang serta terencana.

Bila daerah tersebut telah menerbitkan obligasi berkupon nol maka kemungkinan untuk menerbitkan obligasi pendapatan sangat besar bila ada proyek yang sangat menguntungkan akan dikerjakan. Misalkan, pemerintah daerah ingin mendirikan taman bermain untuk masyarakat sekitar atau proyek listrik maka pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi pendapatan berdasarkan pendapatan dari proyek tersebut sehingga APBDnya tidak terganggu.

Investor Obligasi Daerah

Keberhasilan obligasi daerah tidak terlepas dari berbagai partisan yang ikut berkecimpung dalam transaksi obligasi tersebut. Pemerintah Daerah sebagai penerbit mempunyai peranan penting. Pemerintah Daerah tidak bisa berjalan dengan sendirinya karena sangat dibutuhkan investor yang dapat membeli obligasi tersebut. Investor obligasi daerah bisa diketahui secara jelas yaitu investor individu, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Bank, BPR, perusahaan multifinance, perusahaan swasta dan pemerintah, pemerintah daerah yang surplus dan investor luar negeri. Tabel dalam lampiran paper ini memperlihatkan dana yang dimiliki investor tersebut.

Jumlah dana masyarakat yang terhimpun di perbankan pada akhir 2006 sebanyak Rp 1.300 triliun dimana dana tersebut sekitar 57 persen atau Rp. 742 triliun merupakan milik peorangan; sekitar 24,3 persen atau Rp. 315 triliun milik perusahaan swasta; sekitar 9 persen atau Rp. 118 triliun merupakan milik pemerintah. Bank Perkreditan Rakyat yang juga menghimpun dana masyarakat di pedesaan telah menghimpun dana sebesar Rp. 14 triliun pada akhir tahun 2006. Data ini memberikan informasi bahwa obligasi daerah masih mempunyai tempat di masyarakat. Obligasi tersebut akan sangat laku dijual bila obligasi tersebut memenuhi kriteria yang selalu diinginkan investor seperti yield yang sedikit tinggi, risiko yang sangat rendah dan terjamin. Bila obligasi daerah yang diterbitkan dalam dua tahun kedepan sebesar Rp. 10 triliun tidak akan mempengaruhi keseimbangan dana perbankan, karena dana tersebut hanya merupakan 0,8% dari dana yang dikumpulkan perbankan. Dana Rp. 10 triliun tersebut masih 12,8 persen dari bunga yang dibayarkan perbankan dimana tingkat bunga sebesar 6%.

Pemerintah daerah yang kelebihan dana juga dapat melakukan investasi pada obligasi daerah. Dana yang dimiliki pemerintah daerah ada sebanyak Rp. 68 triliun pada akhir tahun 2006. Artinya, daerah sendiri bisa saling bantu dan tidak perlu melakukan penawaran kepada pihak lain untuk mendapatkan dana melalui obligasi daerah ini.

Dana pensiun yang juga menghimpun dari pekerja untuk keperluan pensiun di masa pensiun pekerja telah mempunyai dana investasi sebesar Rp. 120 triliun.¹ Dana ini cukup besar dan pantas diinvestasikan pada obligasi daerah yang memberikan yield melebihi kebutuhan dana pensiun tersebut. Perusahaan asuransi yang juga mengumpulkan dana dengan premi asuransi dan investasi untuk menanggung risiko yang dihadapi investor telah mempunyai dana investasi sekitar Rp. 60 triliun pada akhir 2006. Dana ini juga sangat layak diinvestasikan pada obligasi daerah yang mempunyai periode mengengah dan panjang.

Pengelolaan Obligasi Daerah

Obligasi daerah yang telah terbit dipasar merupakan tempat investasi dari dana investor dan sumber dana bagi pemerintah daerah. Obligasi daerah ini perlu dikelola dengan baik agar memperoleh image baik sehingga investor mau terus melakukan investasi pada obligasi tersebut sehingga pemerintah daerah tidak kewalahan untuk menerbitkannya.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.07/2006 pasal 2 disebutkan bahwa pengelolaan obligasi daerah oleh Kepala Daerah meliputi:

- a. penetapan strategi dan kebijakan termasuk pengendalian risiko;
- b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjaman daerah;
- c. penerbitan obligasi daerah
- d. penjualan obligasi daerah;
- e. pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo;
- f. pelunasan pada saat jatuh tempo; dan
- g. pertanggungjawaban.

Pengendalian risiko oleh Pemerintah Daerah sangat penting terutama risiko obligasi daerah yang diterbitkan. Risiko utama yang harus dikelola Pemerintah daerah yaitu ketepatan waktu atas pembayaran bunga dan prinsipal obligasi. Untuk ini, Pemerintah daerah harus membuat arus kas keuangan Pemerintah Daerah tersebut. Arus kas ini harus dibuat dalam jangka panjang dan diperbaharui setiap bulannya. Oleh karenanya, sistim informasi pada SKPD harus lebih rapih, cermat dan tepat. Bila Pemerintah Daerah tidak ingin timbul persoalan dalam pembayaran bunga maka obligasi yang diterbitkan sebaiknya obligasi berkupon nol.

Dalam menjual obligasi daerah ini, Pemerintah daerah perlu memperhatikan alokasi pembeli dari obligasi tersebut. Kejadian obligasi Pemerintah Pusat yang selalu harganya diturunkan ketika Pemerintah ingin menerbitkan obligasi baru² agar obligasi tersebut mempunyai yield yang tinggi. Setelah penawaran obligasi selesai, harga obligasi kembali ke level semula. Kejadian ini sudah berulang dan diharapkan tidak terjadi pada obligasi daerah bila alokasi penjualan obligasi sangat bervariasi sehingga likuiditas terjamin. Pemerintah Daerah perlu mempergunakan Investment Banking yang bisa

¹ Data ini diperoleh dari bahan presentasi Ketua Bapepam Dr. Fuad Rahmani, pada diskusi “Pembiayaan Sektor Riil” di Bank Indonesia 25 Juli 2007

² Sejak tahun 2006, Menteri Keuangan telah mengumumkan tanggal penerbitan obligasi dan sekarang ini setiap bulannya ada obligasi yang ditawarkan dan umumnya diantara tanggal 20 - 25 setiap bulannya.

mengatasi persoalan yang diuraikan sebelumnya. Carter dan Manaster (1990) menyatakan bahwa reputasi underwriter (investment banking) sangat berpengaruh terhadap penawaran public offering. Walaupun penelitian tersebut di bidang saham tetapi hasil penelitian tersebut bisa sebagai warning untuk penerbit obligasi daerah.

Dalam penerbitan obligasi daerah jua diperhatikan PP No. 3 tahun 2003 tentang Pengendalian jumlah kumulatif Defisit APBN dan APBD serta jumlah kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada PP tersebut dinyatakan rumusan Rasio Kemampuan membayar kembali pinjaman sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{\{PAD + (DBH - DBHDR) + DAU\} - BelanjaWajib}{AngsuranPokokPinjaman + Bunga + BiayaLain} \geq 2.5$$

DSCR = Debt Service Coverage Ratio atau Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman.

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DBH = Dana Bagi Hasil; dan

DBHDR = Dana Bagi Hasi; Dana Reboisasi

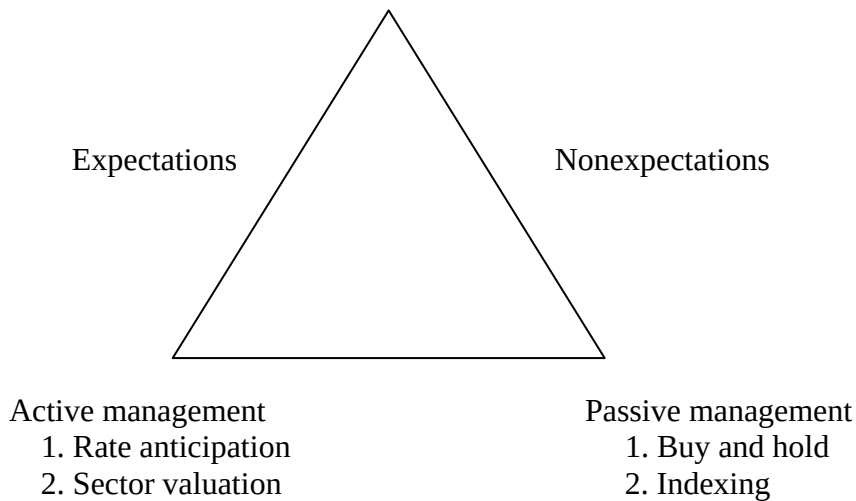
Selanjutnya, Pemerintah Daerah yang menerbitkan obligasi daerah sangat perlu melakukan edukasi mengenai obligasi ini terutama yang menjadi staf pada SKPD. Semakin baik pengetahuan staff SKPD maka semakin baik informasi yang diberikan investor maka reputasi pemerintah daerah semakin bagus. Pengetahuan yang baik juga membuat perencanaan keuangan daerah semakin baik dan perencanaan investasi juga semakin dan kemajuan ekonomi daerah yang bersangkutan semakin dan akhirnya pendapatan masyarakat daerah tersebut mengalami peningkatan.

Pengelolaan obligasi bagi investor umumnya harus disesuaikan dengan karakteristik investor tersebut. Fong dan Fabozzi (1985) menyatakan bahwa pengelolaan portofolio dalam bentuk aset finansial berpendapatan tetap (fixed Income) dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar yaitu pengelolaan aktif, pengelolaan passif dan immunisasi & mencocokkan arus kas. Ketiga pendekatan pengelolaan portofolio tersebut digambarkan dalam bentuk segi tiga yang setiap sudut menggambarkan pengelolaan portofolio.

Sudut pertama menyatakan bahwa pengelolaan portofolio dengan aktif. Dalam pengelolaan ini investor harus mampu melakukan antisipasi terhadap tingkat bunga dan menilai sektor dari perusahaan yang menerbitkan obligasi. Antisipasi tingkat bunga merupakan sebuah tindakan yang membuat investor atau manajer investasi menaikkan durasi dari portofolio agar kenaikan yield tidak membuat harga obligasi portofolio turun tajam atau melakukan perubahan portofolio. Pemilihan dan penilaian sektor usaha sangat penting agar obligasi yang dikelola tetap membayar bunga. Sudut kedua memberikan metode pengelolaan lai yaitu pengelolaan secara pasif dimana manajer investasi membeli dan menahan obligasi sampai jatuh tempo atau pada saat dana dibutuhkan. Disamping, manajer investasi bisa juga mengikuti pola pasar yaitu indeks obligasi. Sudut ketiga menyatakan pengelolaan portofolio dengan menggabungkan kedua pendekatan yang

diuraikan sebelum. Ketiga pengelolaan ini akan diuraikan dengan berbagai contoh pada bab berikutnya.

Immunization & Cash Flow Matching



Bagan 1.3: Pendekatan Pengelolaan portofolio Obligasi

Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh investor atau manajer investasi dalam mengelola portofolio obligasi yaitu tingkat bunga. Untuk pengelolaan aktif portofolio, investor atau manajer investasi setiap saat harus mengetahui perkembangan tingkat bunga. Investor atau Manajer investasi harus membuat antisipasi agar portofolio yang dikelola tidak mengalami penurunan. Sedangkan, pengelolaan passif portofolio tidak begitu memperhatikan tingkat bunga selama portofolio dikelola. Tetapi, investor atau manajer investasi hanya mempelajari benchmark portofolio saja. Pada pengelolaan immunisasi, investor atau manajer investasi membangun portofolio dengan cara membuat portofolio tersebut kebal (immun) dari perubahan tingkat bunga. Awal membuat portofolio, investor atau manajer investasi harus memahami arah tingkat bunga sehingga portofolio yang dibangun dapat memberikan kepuasan investor.

Kesimpulan

Sesuai dengan uraian sebelumnya maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Obligasi daerah sangat layak diterbitkan.
2. Obligasi daerah yang layak diterbitkan pemerintah daerah yaitu obligasi berkupon nol dan obligasi pendapatan, untuk melindungi kepentingan pemerintah daerah dan investor.
3. Obligasi daerah harus dikelola dengan baik agar memberikan image yang cukup baik untuk mendukung penerbitan obligasi berikutnya.
4. Waktu penerbitan obligasi harus diperhatikan Pemerintah Daerah dalam rangkai penjualan obligasi tersebut.
5. Investor dapat menggunakan berbagai pendekatan untuk mengelola obligasi daerah tersebut.

Daftar Referensi

Charter R. dan S. Manaster (1990); Initial Public Offering dan Underwriter Reputation; Journal of Finance, Vol. VL; pp. 1045 – 1067.

Fabozzi, F. (2004); Bond Market, Analysis and Strategies; 5th eds.; Prentice Hall International Editions

_____ (1997); Managing Fixed Income Portfolios; Frank J. Fabozzi Associates, New Hope, Pennsylvania.

_____ (1996); Bond Portfolio Management; Frank J. Fabozzi Associates.

Fabozzi, F. J. and Gifford Fong (1994); Advanced Fixed Income Portfolio Management: The State of the Art; Probus Publishing Company, Chicago, USA.

Fong, H. Gifford and F. J. Fabozzi (1985); Fixed Income Portfolio Management; Dow Jones, Irwin, Illinois, USA.

Fabozzi, F.J.; Martellini, L. And Philippe Priaulet (2006); Advanced Bond Portfolio Management: Best Practices in Modelling and Strategies; John Wiley & Sons Inc.

Alat Likuid di Sistik Keuangan Indonesia

Posisi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Menurut Golongan Pemilik (Rupiah & Valas Rp. Bio)

KETERANGAN	Tahun				
	2002	2003	2004	2005	2006
1. Bukan Penduduk	16,917	9,230	8,710	14,156	21,211
2. Badan / Lembaga pemerintah	18,477	18,182	12,984	14,655	12,269
3. Badan Usaha Milik Negara					
- Perusahaan Asuransi	24,728	23,386	20,308	25,688	31,267
- Perusahaan Pembiayaan	1,357	405	669	376	176
- Lainnya	36,538	32,138	30,367	44,231	52,290
Total Badan Usaha Milik Negara	62,623	55,929	51,344	70,295	83,733
4. Pemerintah	49,262	53,937	55,189	83,704	117,650
Antara lain pemerintah daerah (total)	22,126	21,464	24,463	41,713	68,541
- Dati I	8,507	8,105	9,851	15,761	19,529
- Dati II	13,619	13,359	14,612	25,952	49,012
5. Badan Usaha Milik Daerah	1,193	1,680	1,209	1,359	2,446
6. Badan Usaha Milik Swasta					
- Perusahaan Asuransi	7,495	7,786	8,818	11,147	13,127
- Perusahaan Pembiayaan	1,515	2,026	4,914	2,475	2,313
- Koperasi	3,453	3,401	2,600	3,058	4,717
- Dana Pensiun	21,191	21,536	15,492	15,681	19,464
- Yayasan & Badan Sosial	14,196	14,177	13,051	17,433	20,488
- Lainnya 1)	153,012	170,372	194,475	217,970	255,767
Total Badan Usaha Milik Swasta	200,862	219,298	239,350	267,764	315,876
7. BPR	1,017	1,507	1,475	1,954	2,841
8. Perorangan	494,664	542,562	594,818	680,191	742,728
Total Dana Dihimpun	845,015	902,325	965,079	1,134,078	1,298,754

Posisi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada BPR Menurut Produk Bank (Dalam Rupiah dan Valas Rp. Bio)

KETERANGAN	Tahun				
	2002	2003	2004	2005	2006
Tabungan	2,020,803	2,640,393	3,329,786	3,790,494	3,868,793
Deposito Berjangka	4,124,398	6,251,198	7,859,701	9,420,749	10,059,636
TOTAL	6,145,201	8,891,591	11,189,487	13,211,243	13,928,429

Jumlah Alat Likuid pada Bank Umum (dalam Milyar)

KETERANGAN	Tahun				
	2002	2003	2004	2005	2006
Kas (Cash in vault)	17,732	18,204	17,630	20,553	27,563
Giro pada BI (Demand deposit in BI)	39,139	54,047	70,403	93,804	117,924
TOTAL	56,871	72,251	88,033	114,357	145,487

Jumlah Alat Likuid pada BPR (dalam miliar Rph)

KETERANGAN	Tahun				
	2002	2003	2004	2005	2006
Kas (Cash in vault)	173,626	205,428	242,260	297,345	272,901
Antar Bank Aktiva	1,670,982	2,931,390	3,085,114	3,541,018	3,550,509
TOTAL	1,844,608	3,136,818	3,327,374	3,838,363	3,823,410

Jumlah Alat Likuid pada Perusahaan Pembiayaan (dalam Milyar Rph)

KETERANGAN	Tahun				
	2002	2003	2004	2005	2006
Kas (Cash in Vault)	81	68	136	297	536
Giro pada Bank Umum	1,387	1,223	1,529	2,279	1,951